

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan negara kedepannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, peranan pendidikan sangat dibutuhkan. Pendidikan menuntut adanya perhatian dan partisipasi dari semua pihak. Dengan adanya pendidikan akan dapat mencerdaskan manusia dan membawa kemajuan bagi negaranya. Pembangunan pendidikan seharusnya diutamakan karena suatu kemajuan bangsa dapat dilihat dari kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan seperti siswa, guru, proses belajar-mengajar, manajemen, layanan pendidikan serta sarana penunjang lainnya harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik.

Menurut Langeveld, pendidikan diartikan sebagai pemberian bimbingan dan pertolongan rohani dari orang dewasa kepada mereka yang masih memerlukannya. Pendidikan berlangsung dalam suatu pergaulan antara pendidik

(guru) dan peserta didik (Rahmat, 2018). Pendidik adalah orang dewasa yang berusaha memberikan pengaruh, perlindungan, dan pertolongan yang tertuju pada pendewasaan peserta didik. Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan menjadikan generasi ini sebagai sosok panutan dari pengajaran generasi yang terdahulu (Rahman & Munandar, 2022). Oleh karena itu, bidang pendidikan merupakan faktor penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan terwujudnya pendidikan yang baik pada masyarakat maka hal tersebut dapat menunjang keberhasilan dan meningkatkan produktivitas serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Maju mundurnya ekonomi suatu negara terletak pada maju atau tidaknya pendidikan di negara tersebut, dan inilah yang membuktikan bahwa pendidikan merupakan salah satu landasan ekonomi.

Pendidikan merupakan segala bidang kehidupan dalam memilih dan membina hidup yang baik yang sesuai dengan martabat manusia (Makkawaru, 2019). Pernyataan tersebut menguatkan bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dan bagi anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan (Rinaldi & Nawawi, 2022). Program ini bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan kelompok termiskin.

Tujuan Program Keluarga Harapan secara langsung terkait dengan usaha mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium *Millennium Development Goals (MDGs)* (Djabar & Olilingo, 2022). Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals / MDGs*) adalah deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mulai dijalankan sejak September 2000 (Simangunsong, 2019). *MDGs* memang memiliki peranan dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Dua diantara delapan target dari *MDGs* adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, serta mencapai pendidikan dasar untuk semua. Setidaknya terdapat 5 komponen *MDGs* secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu: (1) Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; (2) Pendidikan bermutu; (3) Pengurangan angka kematian bayi dan balita; (4) Pengurangan kematian ibu melahirkan; dan (5) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tentunya tidak lepas dari berbagai hal yang mewarnai terselenggaranya program ini.

Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memiliki komponen (1) kesehatan, dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun; (2) pendidikan, dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMK /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun; (3) komponen kesejahteraan sosial, dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (Ningsih &

Setiawan, 2022). Komponen-komponen di atas tentunya harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan keluarga yang ingin menerima manfaat bantuan PKH.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan sebagai tempat penelitian ini, sejak tahun pertama pelaksanaannya hingga saat ini, program bantuan PKH tidak terlepas dari berbagai masalah. Secara umum permasalahan tersebut terdiri dari proses verifikasi yang belum sepenuhnya terlaksana, kecemburuan sosial masyarakat, kurangnya koordinasi antar instansi pendukung program PKH, dan mental masyarakat yang masih bergantung pada bantuan PKH.

Permasalahan pertama, proses verifikasi yang belum sepenuhnya terlaksana. Permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu data yang cenderung tidak berubah dalam kurun waktu tertentu. Pihak sekolah, puskesmas, atau pendamping PKH tidak melakukan verifikasi KPM secara *kontinyu* dan optimal. Padahal jika dilakukan KPM bantuan PKH akan terus berubah. Hal ini dikarenakan keluarga ibu hamil yang sudah melahirkan, anak sekolah yang sudah lulus, bisa diganti dengan keluarga lain yang memenuhi persyaratan PKH. Dalam penelitian yang relevan, ditemukan permasalahan dalam PKH diantaranya adalah lemahnya pemukhtahiran data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS) sehingga adanya ketidaktepatan penerima bantuan dan perbaruan data penerima PKH (Azhari & Mulyanie, 2022).

Kedua, kecemburuan sosial. Hal ini karena KPM yang cenderung tidak berubah dalam kurun waktu tertentu sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Seharusnya KPM yang taraf hidupnya sudah meningkat bisa digantikan dengan keluarga miskin lainnya. Pada penelitian relevan, diperoleh

temuan permasalahan serupa dalam Program Keluarga Harapan diantaranya adalah bantuan PKH belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat miskin terutama yang anak-anaknya sedang mengeyam pendidikan sehingga terjadilah kecemburuan sosial di kalangan masyarakat (Ramly & Syaban, 2022).

Ketiga, kurangnya koordinasi antar instansi pendukung yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, dan Kementrian Sosial. Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui kementerian apa yang mengeluarkan bantuan PKH sehingga tidak sedikit dari mereka yang bertanya ke petugas pendataan dari Dinas Sosial. Adanya kurang koordinasi, maka pertanyaan-pertanyaan di lapangan kadang tidak terjawab oleh petugas. Banyak juga masyarakat yang tertipu oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan dijanjikan akan mendapatkan bantuan PKH asal membayar atau memberikan data keluarga. Baik tertipu uang maupun datanya digunakan untuk hal lain yang tidak benar. Pada penelitian relevan, ditemukan permasalahan bahwa terdapat beberapa kasus bahwa pendamping atau petugas PKH tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dan melakukan penyalahgunaan dana PKH seperti melakukan tindakan korupsi terhadap dana bantuan PKH (Sompie & Yogopriyatno, 2022).

Terakhir, masyarakat masih memiliki mental bergantung pada bantuan PKH. Dengan diberikannya bantuan, diharapkan masyarakat memiliki modal untuk usaha dan keluar dari garis kemiskinan. Namun nyatanya, masyarakat yang mendapat bantuan malah semakin bergantung dan tidak bisa mandiri. Bantuan yang harusnya bisa untuk modal, hanya dibelanjakan untuk kebutuhan hidup

sehari-hari yang menjadikan taraf kesejahteraan mereka tidak meningkat. Permasalahan yang sama juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam Program Keluarga Harapan adalah masih adanya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari PKH (Sutikno & Amanda, 2022).

Terdapat banyak daerah di Indonesia yang menerima bantuan PKH. Daftar penerima bantuan ini dapat diakses secara *online* melalui <https://cekbansos.kemensos.go.id/>. Salah satu wilayah yang menerima bantuan ini adalah Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kelurahan Palmerah merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki jumlah warga terbesar penerima PKH di Kecamatan Palmerah yaitu 297 KPM. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kelurahan Palmerah masih kurang memadai. Hasil sensus penduduk menyatakan jumlah penduduk Kelurahan Palmerah adalah 71.466 Jiwa. Kelurahan Palmerah memiliki luas wilayah sebesar 2,11 km², dengan kepadatan penduduk 33.870 Jiwa/km². Dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak dan tingkat kepadatan yang tinggi, dikhawatirkan kesejahteraan penduduk di Kelurahan Palmerah belum merata. Ditambah lagi KPM yang menerima bantuan PKH tidak banyak berubah dari tahun ke tahun yang membuat spekulasi bahwa taraf kesejahteraan KPM tersebut tidak meningkat. Salah satu yang menyebabkan taraf kehidupan suatu keluarga tidak meningkat adalah faktor pendidikan.

Meskipun telah banyak strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akses sekolah, nyatanya angka partisipasi sekolah di Indonesia

masih belum optimal. Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa indikator partisipasi sekolah dapat menjadi alat untuk memantau efektivitas program pendidikan dari pemerintah dan melihat capaian target pembangunan pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan yang berkualitas tercermin dari sejauh mana pencapaian partisipasi sekolah setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, ras, tempat tinggal, termasuk juga penyandang disabilitas. Partisipasi sekolah penduduk dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi (Dewa, 2022).

Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, sesuai dengan program kerja dari PKH bidang pendidikan dimana komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Dengan PKH diharapkan peserta PKH (selanjutnya disebut Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidak berdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diperoleh kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapan pada komponen bidang pendidikan mampu mencapai tujuannya yaitu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Misalnya hasil penelitian Vevin (2022) yang menyimpulkan bahwa PKH telah membuktikan dengan banyaknya jumlah angka penerima PKH pada

tahun 2020 dapat meningkatkan partisipasi pendidikan. Dalam hasil penelitian yang dilakukan Rusyidi (2016) menyimpulkan bahwa bantuan PKH mampu menjelaskan atau mempengaruhi partisipasi pendidikan anak-anak (RTSM) di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie mencapai 96,8%.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, PKH akan memberikan *income effect* kepada RTSM/KSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sehingga mengurangi angka anak yang bekerja di bawah umur (Jaya & Domri, 2021). Sedangkan untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya. Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun.

Bantuan PKH bisa terlaksana dengan baik jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam kesuksesan program tersebut bukan hanya menuntut bantuan dari pemerintah dan lama kelamaan bersifat bergantung pada bantuan. Pernyataan tersebut didukung dengan salah satu penelitian yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat partisipasi masyarakat dengan Program Keluarga Harapan (A. C. S. Putri, 2021). Peraturan kementerian sosial telah menjelaskan bahwa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) harus aktif pada

setiap program yang dilakukan sesuai dengan syarat yang ada. Namun, kenyataannya tidak semua KPM patuh pada setiap peraturan atau persyaratan yang diberikan sehingga tidak jarang partisipasi masyarakat menjadi kurang maksimal.

Tujuan Program Keluarga Harapan yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan (Aeda, N., & Jannah, 2022). Namun seringkali kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan pelaksanaan ketika di lapangan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Masalah tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kurang berpartisipasinya masyarakat sehingga dampak dan tujuan yang diharapkan seringkali tidak terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Palmerah khususnya dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, penelitian ini selanjutnya berjudul “Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dibatasi hanya pada program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan memiliki manfaat, diantaranya:

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini untuk melihat bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan dari respon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga dapat dilakukan peningkatan kinerja dalam pengimplementasian PKH. Dengan demikian bantuan PKH komponen pendidikan ini benar-benar dapat meningkatkan partisipasi pendidikan.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat agar pengetahuan mereka mengenai Program Keluarga Harapan ini dapat bertambah, khususnya pada komponen pendidikan sehingga masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat mampu meningkatkan partisipasinya dalam pendidikan.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menjadi bahan pembelajaran dan mengambil sisi positif dalam pelaksanaan program ini.